



# MODUL LABORATORIUM PRATIUM PERPAJAKAN

Ditulis oleh Fadjar Harimurti

---

# Modul Laboratorium

# Pratikum Perpajakan

---

---

Oleh:

FADJAR HARIMURTI

Penerbit



Unisri Press

# **Modul Laboratorium Pratikum Perpajakan**

---

**Penulis:**  
**Fadjar Harimurti SE.MSi.AK.CA.**

**ISBN: 978-623-5859-02-6**

Penyunting: Nuniek Prasetyowati

Tata letak: Wisnu Widi

Desain sampul: Anindyo Mahendra Prasetyo

**Penerbit: UNISRI Press**

**Redaksi:**

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari, Surakarta  
unisripress@gmail.com/ press.unisri.ac.id  
Anggota APPTI

Dicetak oleh “Percetakan Kurnia” Solo

**Cetakan Pertama, November 2021**

**Copyright © 2021**

**ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS**

**Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku tanpa izin tertulis dari penulis/ penerbit.**

# **Kata Pengantar**

---

Puji syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan ke Hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan berkat-Nya, penulis akhirnya mampu merampungkan naskah buku “Modul Laboratorium Pratikum Perpajakan” ini. Buku ini diharapkan mampu menjadi wujud syukur sekaligus media untuk berbagi wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa jurusan Akuntansi.

Di dalam buku ini, disajikan materi lengkap yang diharapkan dapat menjadi panduan praktikum perpajakan bagi mahasiswa. Buku modul ini berisi berbagai penjelasan dan keterangan yang disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami, sekaligus berisi contoh-contoh untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam belajar.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat positif bagi para pembacanya dan memperkaya khazanah pendidikan serta literasi. Masukan dan saran membangun pun senantiasa diterima demi perbaikan buku ini selanjutnya.

Surakarta, 2021  
Penyusun

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB 1 Informasi dan Pedoman Umum Praktikum.....	1
A. Informasi Umum Praktikum.....	1
B. Kode MAP/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran.....	3
BAB 2 PPh Wajib Pajak Badan.....	19
A. Informasi Umum Perusahaan.....	19
B. Data Pengurus dan Pemegang Saham.....	21
C. Data Laporan Laba Rugi Tahun 2019.....	22
D. Informasi Laporan Keuangan Tahun Pajak 2019.....	25
E. Instruksi Kerja.....	32
F. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan.....	34
BAB 3 Kasus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 SS. .....	38
A. Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 SS.....	38
B. Instruksi Kerja.....	40
BAB 4 Kasus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 S.. .....	41
A. Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 S.....	41
B. Instruksi Kerja.....	43

C. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan.....	44
BAB 5 Kasus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 NPPN.....	48
A. Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 NPPN.....	48
B. Instruksi Kerja.....	52
C. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan.....	53
BAB 6 Kasus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 Pembukuan.....	57
A. Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 Pembukuan.....	57
B. Instruksi Kerja.....	63
C. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan.....	64
Daftar Pustaka.....	89
Profil Penulis.....	90

# *BAB 1*

## **9** Informasi dan Pedoman

### **Umum Praktikum**

---

#### ***A.* Informasi Umum Praktikum**

Buku Praktikum Perpajakan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan latihan bagi mahasiswa melalui pemecahan kasus suatu perusahaan industri manufaktur sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kasus kasus dalam buku praktikum ini dibuat sedemikian rupa mendekati kejadian sebenarnya. Wajib Pajak yang menjadi objek kasus di sini adalah perusahaan industri manufaktur yang melakukan transaksi ekspor dan impor, melakukan penyerahan barang kepada instansi pemerintah, pengusaha kena pajak, dan pengusaha bukan kena pajak dengan hasil produksinya berupa kaos tangan rajut dan kaos tangan lateks serta beberapa karyawan yang menjadi sempel dalam penghitungan dan pelaksanaan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada akhir tahun pajak harus mengisi serta melaporkan pajak terutangnya.

Kegiatan praktikum pada setiap bab dibagi dalam dua bagian, dimana setiap bagian terdiri atas kasus dan lembar kerja. Aspek perpajakan yang dibahas dalam kasus ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana pertama penyelesaian kewajiban Wajib Pajak Badan , terdiri atas berikut ini,
  - a. Penyusunan Aktiva Tetap.
  - b. Laporan Rekonsiliasi Fiskal.
  - c. Pajak Penghasilan Pasal 25.
  - d. Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk kurang bayar atau Pasal 28A untuk lebih bayar akhir tahun.
  
- b. Bagian pertama penyelesaian kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kategori sebagai berikut.
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi formulir 1770 SS.
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi formulir 1770 S.
  - c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi formulir Norma Penghitungan Neto.
  - d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengisi formulir 1770 Pembukuan.

Peraturan perpajakan yang selalu berubah membuat perhitungan dapat berubah, sehingga dalam kasus ini kita memakai peraturan yang berlaku sampai dengan tahun 2019. Oleh karena tahun pajak yang dipakai adalah tahun 2019,



maka apabila ada perubahan peraturan dianggap tidak ada perubahan peraturan dalam formulir - formulir pajak pada buku ini menggunakan formulir tahun 2019.

## **B. Kode MAP/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran**

Kode MAP/ Kode jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk memudahkan pengisian dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan dalam kasus ini sebagai berikut.

### **MAP/ Kode Jenis Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22**

<b>Kode jenis Setoran</b>	<b>Jenis Setoran</b>	<b>Keterangan</b>
100	Masa PPh Pasal 22	Untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh pasal 22.

200	STP PPh Pasal 22	Untuk pembayar pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 22
300	STP PPh Pasal 22	Untuk pembayar jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
31 0	SKPKB PPh Pasal 22	Untuk pembayar jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
311	SKPKB PPh Final Pasal	Untuk pembayar jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
320	SKPKBT PPh Pasal 22	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh pasal 22.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.
390	Pemabayaran atas Surat Keputusan Pembetulan,	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat

	Surat Keputusan Keberatan, Atau Putusan Banding	Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 22 atas Penebus Migas	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penembus Migas.
402	PPh Final Pasal 22 Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas penyerahan rokok produksi dalam negeri.
900	Pemungutan PPh pasal 22	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh pemungut.

**MAP/ Kode jenis Pajak 41123 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22  
Impor**

<b>Kode jenis Setoran</b>	<b>Jenis Setoran</b>	<b>Keterangan</b>
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22 Impor	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
300	STP PPh Pasal 22 Impor	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor
311	SKPKB PPh Final Pasal 22	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
320	SKPKBT PPh Pasal 22	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Final Pasal 22.
390	Pemabayaran atas Surat Keputusan Pembetulan,	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat

	Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
--	-------------------------------------------------	--------------------------------------------

### MAP/Kode Jenis Pajak 411124 untuk jenis pajak PPh Pasal 23

Kode jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor ( Selain PPh pasal 23 atasdividen, bunga, royalti, dan jasa ) yang tercantum dalam SPT Masa PPh pasal 23 termasuk pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	Untuk pembayaran PPhPasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

102	PPH Pasal 23 atas Bunga	Untuk pembayaran PPh pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPH Pasal 23 atas Royalti	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104	PPH Pasal 23 atas Jasa	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT masa PPh Pasal 23.
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 23	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300	STP PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 ( <b>selain</b> STP PPh

		Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalty, dan jasa.
310	SKPKB PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 ( <b>selain</b> SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
312	KPKBT PPh Final Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320	SKPKBT PPh Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam

		SKPKBT PPh Pasal 23 ( <b>selain</b> SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.
401	PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi



**MAP/Kode Jenis Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal  
25/29 Orang Pribadi**

Kode jenis Setoran	JenisSetoran	Keterangan
100	Masa PPhPasal 25 Orang Pribadi	Untuk Pembayaran PPh Pasal 25 Orang yang terutang.
101	PPh Pasal 25 Orang pribadi Pengusaha Tertentu	Untuk pembayaran masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
199	Pebayaran Pendahuluan skp PPhPasal 25 Orang Pribadi	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi.
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Tahunan PPh Orang Pribadi.
300	STP PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
310	SKPKB PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar

		yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Tercantum.
320	SKPKBT PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Atau Putusan Banding	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Atau Putusan Banding.

**MAP/Kode Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29  
Badan**

<b>Kode jenis Setoran</b>	<b>Jenis Setoran</b>	<b>Keterangan</b>
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	Untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
101	PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang tidak bersifat final Badan	Untuk pembayaran Masa PPh Badan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak bersifat final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang kegiatan utamanya bukan melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan merupakan bagian pembayaran pendahuluan (PPh Pasal 25)

199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 25 Badan	Untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 25 Badan.
200	Tahunan PPh Badan	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.
300	STP PPh Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
310	SKPKB PPh Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320	SKPKBT PPh Badan	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, atau Putusan Banding	Untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, atau Putusan Banding.

## Tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk menghindari denda keterlambatan, PTIndonesia menetapkan kebijakan sehubungan tanggal pemyetoran / pembayaran pajak dan penyampaian SPT dilakukan  $\pm 5$  hari sebelum batas waktu terakhir penyetoran dan pelaporan. Penetapan tanggal penyetoran/pembayaran pajak, seperti pada tabel berikut ini.

<b>Jenis Pajak</b>	<b>Tanggal Pembayaran / Penyetoran</b>	<b>Tanggal Pelaporan / Penyampian SPT</b>
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 5 bulan berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 21/26	Tanggal 5 bulan berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 5 bulan berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPN dan PPn BM	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Wajib Pajak Badan	Tanggal 20 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak	Tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak

PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Tanggal 20 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
-------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

### **Penjelasan Status Wajib Pajak Orang Pribadi**

- (TK/....) Wajib Pajak tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurang PTKP.
- (K/.....) Wajib Pajak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- (K/I/....) Wajib Pajak Kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- (PH/....) Wajib Pajak Kawin yang pisah harta dan penghasilan.
- (HB/....) Wajib Pajak Kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

## **Pedoman Umum Proses Belajar-Mengajar Praktikum**

1. Buku Praktikum ini berisi tentang informasi umum, kasus, instruksi, kertas kerja, serta formulir-formulir. Formulir-formulir perpajakan telah disesuaikan dengan pengaturan yang diberlakukan di tahun 2019 sesuai dengan tahun pajak yang dipakai dalam kasus praktikum ini.
2. Sebelum mengerjakan, sebaiknya mahasiswa membaca keseluruhan kasus yang ada dengan cermat. Dalam pengerjaannya, baik kertas kerja maupun formulir disusun sesuai dengan masa pajak yang dikerjakan. Hal ini untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami Langkah apa yang harus dikerjakan tanpa harus dituntun langsung oleh dosen secara terus menerus.
3. Mahasiswa mengerjakan praktikum didalam ruang laboratorium akuntansi atau ruang kelas yang memadai sebagai ruang laboratorium.
4. Rencana pengajaran praktikum disampaikan pada awal tatap muka di kelas.
5. Mahasiswa dikondisikan bekerja sebagai pegawai pajak di PT Indonesia yang menangani pajak.
6. Memasuki ruangan praktikum, mahasiswa diharuskan:
  - Berpakaian rapi,

- Masuk dan keluar ruangan harus tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan,
  - Mengerjakan semua pekerjaan di dalam ruang dan tidak diperkenankan di bawa keluar ruangan,
  - Tidak boleh makan dan minum di dalam ruangan.
7. Alat dan bahan yang dipergunakan selama mengerjakan praktikum adalah: Undang -Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksananya, alat tulis- menulis dan kalkulator.



# BAB 2

## **P** Ph Wajib Pajak Badan

---

### *Kasus PPh Wajib Pajak Badan*

#### ***A.*** Informasi Umum Perusahaan

**PT. Indonesia** adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di industry tekstil dengan hasil produksi “kaosTangan Rajut dan Lateks”. Didirikan dengan akta notaris Sulis, S.H., tanggal 08 Agustus 2004 yang berkedudukan di Jalan Mongosidi No.24-25 Karanganyar.

Bentuk perusahaan adalah PerseroanTerbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor; B-9634 HT:01.01.2004 tanggal 28 Desember 2004. Perusahaan mulai beroperasi dan memproduksi tanggal 1 Januari 2006. Perusahaan ini telah terdaftar di KPP Karanganyar dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berikut ini adalah data-data yang berhubungan dengan PT Indonesia untuk kepentingan pajak 2019.

1. Nama Perusahaan : PT Indonesia
2. NPWP/NPPKP : 01.385.537.4-322.000
3. Tanggal Pengukuhan : 10 Januari 2005
4. Alamat Tempat Usaha : Jl. Mongosidi No.24-25  
Karanganyar
5. E-mail : kaos@gmail.co.id
6. Kode Pos : 55555
7. Nomor Telepon/Fax : (0271) 800001
8. Merek Usaha : WANTEX
9. Izin Sentralisasi : -
10. Jenis Usaha : Industri Pakaian (Kaos Tangan)
11. Nomor KLU : 32200
12. Pembukuan : Akrual, Bahasa Indonesia,  
Komputer, Rupiah
13. Metode Penyusutan : Garis Lurus
14. Tahun Buku : 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember  
2019
15. Opini Auditor : Wajar Tanpa Pengecualian
16. Kantor Akuntan Publik : Rizky dan Rekan NPWP  
02.253.409.5-322.000\
17. Akuntan Publik : Dewa S.E., Ak., M.Si., CPA/NPWP  
04.098.816.4-332.00
18. Kantor Konsultan Pajak : Putra Consulting/NPWP  
02.473.664.9-332.000
19. Konsultan Pajak : Tegar, S.E., Ak., M.Si. BKP/NPWP  
06.812.094.8-322.000

## **B. Data Pengurus dan Pemegang Saham**

### **1. Daftar Sunanan Pemegang Saham**

<b>No.</b>	<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>NPWP</b>	<b>Alamat</b>
1.	Embun	04.004.871.2-324.000	PerumBrigin Raya Blok E10 No.85 Solo
2.	Raka	04.035.938.2-323.000	Perum Vila Citra Blok B1 No.112 Solo
3.	Lyra	04.142.579.4-322.000	Jend.Sudirman No.10 Solo
4.	CV Lawu	01.130.568.7-323.000	ZA. PagarAlam No.256B Solo

### **2. Perincian Modal Disetor dan Dividen Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Modal Disetor</b>		<b>Diveden per Lembar</b>
		<b>Jumlah Lembar</b>	<b>Nominal per Lembar</b>	
1.	Embun	30.000	Rp10.000	Rp500
2.	Raka	25.000	Rp10.000	Rp500
3.	Lyra	25.000	Rp10.000	Rp500
4.	CV Lawu	30.000	Rp10.000	Rp500

### 3. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No.	Nama Pemegang saham	Jabatan Pengurus	Alamat
1.	Embun	Komisaris Utama	PerumBrigin Raya Blok E10 No.85 Solo
2.	Raka	Komisaris	Perum Vila Citra Blok B1 No.112 Solo
3.	Lyra	Direktur	Jend.Sudirman No.10 Solo

### *e.* Data Laporan Laba Rugi Tahun 2019

Data Laporan Laba Rugi Tahun 2019 adalah sebagai berikut (dalam rupiah).

#### PENGHASILAN BRUTO

1. Penjualan ekspor 70.000.000.000
2. Penjualan dalam negeri

Kepada instansi pemerintah dan pemungut lain	6.600.000.000
Penjualan dalam negeri lainnya	15.400.000.000
Potongan penjualan	1.045.000.000
Retur penjualan	100.000.000
Jumlah penjualan neto dalam negeri	20.855.000.000

3. Penjualan neto	90.855.000.000
4. Harga pokok penjualan	<u>35.370.625.000</u>
<b>Jumlah penghasilan bruto</b>	<b>55.484.375.000</b>

### **BEBAN USAHA**

1. Gaji THR dan bonus	1.182.838.500
2. Permi dan asuransi	400.000.000
3. Perjalanan dinas	200.000.000
4. ATK	40.000.000
5. Listrik, telepon, air perusahaan	50.000.000
6. Teleponatauteleks	300.000.000
7. Cadangan utang tak tertagih	1.400.000.000
8. Penghapusan piutang tak tertagih	500.000.000
9. Bunga pinjaman Bank Sendiri	50.000.000
10. Sewamesin	310.000.000
11. Reparasi	350.000.000
12. Jasa professional	53.000.000
13. PembayaranroyaltykePTAndersen	100.000.000
14. Pengangkutan	400.000.000
15. Penyusutan	684.900.000
16. Pemasaran atau promosi	300.000.000
17. Kerugian fiscal tahun 2008	20.000.000
18. Lain-Lain	100.000.000
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>6.440.738.500</b>
<b>LABA USAHA NETO</b>	<b>49.043.636.500</b>



## D. Informasi Laporan Keuangan Tahun Pajak 2019

1. Data Penjualan kepada pemungut PPN sebagai berikut.

<b>Nama/ NPWP</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nilai Penyerahan (Rp)</b>	<b>Tanggal Penyera han</b>	<b>Tanggal Pembaya ran</b>
Dinas Pekerjaan Umum Kota Solo 00.050.340 .0.627.000	Jln. Adi Sucipto No 74 Solo	754.000.000	12 Februari 2019	25 Februari 2019
Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang 00.052.340 .0.605.000	Jln. P. Emir No.65 Krembang an Malang	1.638.000.000	19 Februari 2019	26 Februari 2019
Dinas Kebersihan dan Pertanama nan Kota Surabaya 00.025.333. 0.609.000	Jln. Gn. Merbagu No.234 Wonoloco Surabaya	1.170.000.000	9 April 2019	16 April 2019
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota	Jln. Arif Rahman Hakim No.54	1.850.000.000	6 Agustus 2019	11 Agustus 2019

Rembang 00.024.334. 0.822.000	Gorontalo			
Dinas Pertanian, Perternaka n, Perkebuna n, dan Kehutanan Blora 00.030.350 .0.322.000	Jln. Soekarno Hatta No.9 Blora	1.188.000.000	19 Agustus 2019	26 Agustus 2019
<b>Total</b>		6.600.000.000		

Nilai penyerahan termasuk (*include*) PPN. Surat Setoran Pajak (SSP) atas transaksi penjualan kepada pemungut terlampir.

2. Dalam diskon penjualan terdapat diskon penjualan yang belum terealisasi karena belum terjadi pelunasan dalam masa diskon oleh para pelanggan sebesar Rp150.000.000.
3. Perusahaan mengantisi pasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisihan retur penjualan. Retur penjualan yang benar-benar telah terealisasi tahun 2019 berjumlah Rp50.000.000.
4. Perusahaan menggunakan metode “COMWIL,” untuk penilaian persediaan bahan pembantu.



<b>Uraian</b>	<b>Harga Pokok (Rp)</b>	<b>Harga Pasar (Rp)</b>
Persediaan Awal	11.000.000.000	11.500.000.000
Persediaan Akhir	12.000.000.000	10.500.000.000

5. Perusahaan menggunakan metode “COMWIL,” untuk penilaian persediaan bahan baku.

<b>Uraian</b>	<b>Harga Pokok (Rp)</b>	<b>Harga Pasar (Rp)</b>
Persediaan Awal	33.000.000.000	33.500.000.000
Persediaan Akhir	32.000.000.000	32.500.000.000

6. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdapat pembelian impor pada Shinyei Co.Ltd perusahaan yang berkedudukan Yokohama jepang, dengan nilai impor untuk pembelian bahan baku Rp550.000.000 dan pembelian bahan penolong sebesar Rp13.000.000. Pajak atas impor transaksi ini telah dipungut oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cuka dengan bukti pemotongan terlampir. PT Indonesia telah memiliki Angka Pengenal Impor (API).
7. Dalam gaji dan upah termasuk pakaian seragam bagian marketing dan karyawan bagian produksi sebesar Rp22.500.000, seragam satpam sebesar Rp3.000.000 dan Jaminan Hari Tua karyawan yang dibayar oleh perusahaan sebesar Rp79.281.600.
8. Sejak berdirinya perusahaan ini, metode penyusutan yang digunakan, baik menurut komersial maupun fiscal, sama-sama menggunakan metode garis lurus.
9. Penyusutan bangunan kantor, furniture & fixture, computer/ printer, telepon seluler, dan kendaraan

sedan masuk ke biaya umum administrasi dan penjualan, sedangkan asset lainnya masuk ke harga pokok produksi.

#### 10. Data Aset Tetap

N o.	Aset Tetap	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Umur Komer sial	Kelomp ok
1.	Pabrik A (STLateks)	Juli 2010	15.000.000.000	15Tahun	Bangunan Permanen
2.	Pabrik B (STRajut)	Januari 2013	25.000.000.000	15Tahun	Bangunan Permanen
3.	Kantor	Januari 2011	1.600.000.000	10Tahun	Bangunan Permanen
4.	Furniture & Fixture	Januari 2016	1.440.000.000	4Tahun	1
5.	Komputer/ Printer	Maret 2017	150.000.000	4Tahun	1
6.	Telepon Seluler	Januari 2018	9.600.000	4Tahun	1
7.	Mesin PabrikA	Januari 2012	30.000.000.000	8Tahun	2
8.	Mesin PabrikB	Januari 2013	20.000.000.000	8Tahun	2
9.	Kendaraan Sedan Manajer Pemasaran	Januari 2016	1.000.000.000	8Tahun	2
10 .	Mesin PabrikA	Januari 2011	57.200.000.000	16Tahun	3

11.	Mesin Pabrik B	Januari 2013	40.800.000.000	16 Tahun	3
12.	Mesin Pabrik B	November 2019	3.500.000.000	16 Tahun	3
13.	Mesin Diesel	April 2011	1.500.000.000	16 Tahun	3
14.	Generator Listrik	April 2011	1.500.000.000	16 Tahun	3
	<b>TOTAL</b>		<b>198.699.600.000</b>		

11. Dalam biaya lain-lain, termasuk biaya perawatan kendaraan sedan pribadi direktur Rp 50.000.000, dan biaya keanggotaan klub Kesehatan direksi sebesar Rp 150.000.000.
12. Biaya umum administrasi dan penjualan.
  - a. Dalam biaya gaji, THR, dan bonus terdapat Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 24.269.000 dan gaji pembantu rumah tangga para direksi Rp 150.000.000.
  - b. Dalam biaya asuransi terdapat biaya asuransi kebakaran mess karyawan sebesar Rp 40.000.000.
  - c. Dalam biaya listrik, termasuk biaya listrik untuk mess karyawan sebesar Rp 1.500.000.
  - d. Penghapusan piutang tak tertagih telah memenuhi syarat Pasal 6 Ayat (1) huruf h.
  - e. Data pinjaman dan deposito yang dimiliki adalah sebagai berikut :  
Pinjaman tahun 2019 diperoleh dari Bank Dewek dengan batas maksimum Rp 300.000.000 dengan

tingkat suku bunga 20%. Dari jumlah tersebut diambil pada bulan Februari sebesar Rp 200.000.000, pada bulan April diambil lagi sebesar Rp 75.000.000, dan sisanya Rp 25.000.000 diambil pada bulan Agustus. Bank Dewek beralamat di Jalan Laksamana Malahayati No.67 A Solo, NPWP 01.308.464.5-322.000. Disamping itu, perusahaan juga mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Dewek dengan perincian sebagai berikut.

- 1) April s.d. Mei sebesar Rp 100.000.000.
  - 2) Juni s.d Oktober sebesar Rp 500.000.000.
  - 3) November s.d Desember sebesar Rp 200.000.000.
- f. Dalam biaya reparasi, termasuk biaya reparasi kendaraan sedan yang digunakan oleh manajer pemasaran sebesar Rp 40.000.000
- g. Dalam biaya promosi terdapat bantuan yang diberikan kepada Pemda Kota Karanganyar dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Karanganyar sebesar Rp 10.000.000, dan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Festival Krakatau 2019 sebesar Rp 20.000.000
- h. Perincian biaya lain-lain (dalam Rp) :

Jamuan tamu yang ada daftar nominative	25.000.000
Jamuan tamu yang tidak ada daftar nominative	10.000.000
Denda dan Bunga SPT PPh Pasal	18.000.000

25 masa Desember 2018	
PBB Kantor	10.750.000
Sumbangan korban banjir DKI	7.000.000
Sumbangan bencana alam Gunung Sinabung	7.000.000
Sumbangan bencana alam Gunung Semeru	7.000.000
Tidak dapat diperinci karena tidak ada bukti	15.250.000
<b>Jumlah biaya lain</b>	<b>100.000.000</b>

13. Pendapatan dividen di PT.Hilman Jaya setelah dipotong PPh Pasal 23. PT Hilman Jaya beralamat di Jln. Raya Cikoko Timur Raya No.89, Jakarta Selatan-12770.NPWP 01.278.022.7-625.000.
14. Pada tanggal 25 Maret 2019 salah satu tanah yang dimiliki oleh perusahaan yang harga perolehannya Rp400.000.000 dijual kepada CV Mekar sari dengan alamat Jln.Merdeka No.22, Solo, NPWP 01.630.061.0-322.000 dengan harga Rp600.000.000. PPh yang disetor sebesar Rp30.000.000.
15. Penghasilan atas dividen dari Timor Leste Co. telah dipotong pajak yang berlaku di negara Timor Leste dengan tarif 15%.Pajak yang dipotong sebesar Rp52.500.000 atas penyertaan saham sebesar 30%
16. Berikut ini perincian PPh Pasal 25 yang telah dibayar Tahun 2019 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing Rp500.000.000, sedangkan untuk masa Maret

s.d.Oktober masing-masing sebesar Rp1.000.000.000, untuk masa November dan Desember wajib pajak telah mengajukan pengurangan PPh Pasal 25 (permohonan diterima lengkap oleh KPP pada tanggal 10 Oktober 2019) menjadi Rp700.000.000/bulan dan telah disetor tepat waktu. Pada tanggal 21 November 2019 KPP telah mengeluarkan keputusan pengurangan PPh Pasal 25 untuk masa November dan Desember 2019 yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak dan telah menerbitkan STPPPh Pasal 25 pada tanggal 24 Januari 2020 Rp618.000.000 (termasuk sanksi bunga). Pada saat STP diterima, WajibPajakbelummenyampaikan STP Tahunan.

17. Agar tidak terkena denda pajak,PT Texindo Raya Indonesia telah menyetor angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari s.d.Maret 2020 yang jumlahnya sama dengan masa sebelumnya.

## **E. Instruksi Kerja**

1. Hitunglah Dasar Pengenaan Pajak dan PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan Pemungut PPN.
2. Hitunglah PPh Pasal 22 atas transaksi impor pembelian bahan baku dan bahan penolong.
3. Hitunglah pemakaian bahan baku dan bahan penolong menurut ketentuan fiscal.
4. Hitunglah besarnya penyusutan dan nilai buku aktiva tetap menurut fiscal.

5. Hitunglah beban Bunga pinjaman yang diperkenankan fiscal sebagai biaya, apabila Wajib Pajak mempunyai deposito.
6. Hitunglah penghasilan yang diterima di dalam negeri dan di luar negeri.
7. Hitunglah penghasilan neto fiscal pada kertas kerja laporan rekonsiliasi fiscal yang telah disediakan.
8. Hitunglah PPh yang terutang dan PPh yang kurang (lebih) disetor untuk tahun pajak 2014 pada kertas kerja yang telah disediakan.
9. Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2020 pada kertas kerja yang telah disediakan.
10. Isilah Surat Setoran Pajak (SSP) dan setorkan PPh Pasal 25 Masa Maret 2020 sesuai dengan perhitungan yang telah anda buat di Bank BINI (Angsuran PPh Pasal 25 Masa sebelumnya telah disetorkan tepat waktu).
11. Isilah Surat Setoran Pajak (SSP) dan setorkan PPh Pasal 29 atas kurang bayar pajak Tahun 2019 di Bank BINI.
12. Isilah dan laporkan Formulir SPT Tahunan Wajib pajak Badan Tahun Pajak 2019.

## 7. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan

1. Perhitungan Transaksi Penjualan dengan Pemungut PPN dan PPhPasal 22 yang Dipungut Tahun 2019.

No	Nama Pemungut	Nilai Penyerahan (termasuk PPN) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPhPasal 22 Dipungut (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	TOTAL			

2. Perhitungan Transaksi Pembelian Impor dan PPh Pasal 22 yang Dipungut Tahun 2019.

No.	Nama Pemungut	Nilai Penyerahan (termasuk PPN) (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPhPasal 22 Dipungut (Rp)
1.				
2.				
	TOTAL			



**3. Perhitungan Pemakaian Bahan Baku dan bahan Penolong Tahun 2019.**

**a. Perhitungan menurut perusahaan adalah sebagai berikut.**

<b>Uraian</b>	<b>Bahan Baku (Rp)</b>	<b>Bahan Penolong (Rp)</b>
Pemakaian bahan		
Persediaan Awal Bahan		
Persediaan Akhir Bahan		
Pembelian		

**b. Perhitungansesuai ketentuan fiscal adalah sebagaiberikut.**

<b>Uraian</b>	<b>Bahan Baku (Rp)</b>	<b>BahanPenolong (Rp)</b>
Pers.AwalBahan		
Pembelian		
Persediaan Akhir Bahan		
Pemakaian bahan		

**5. Menghitung Beban Bunga Pinjaman yang Diperkenankan Fiskus sebagai Biaya, apabila Wajib Pajak Mempunyai Deposito**

**a. Menghitung rata-rata pinjaman per bulan**

<b>Periode Pinjaman</b>	<b>Jumlah Pinjaman (Rp)</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Jumlah			
Rata-rata pinjaman per bulan			

**b. Menghitung rata-rata deposito**

<b>Periode Pinjaman</b>	<b>Jumlah Pinjaman (Rp)</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Jumlah			
Rata-rata pinjaman per bulan			

## 6. Perhitungan Penghasilan di Luar Usaha

### a. Penghasilan di dalam negeri

No	Nama Pemotong	Jenis Penghasilan	Penghasilan Sesudah Dikenakan PPh (Rp)	Perhitungan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)		Bukan Objek Pajak (Rp)
						PPh Pasal 23	PPh Pasal 4 Ayat (2)	
1								
2								
3								
4								
	TOTAL							

### b. Penghasilan di luar negeri

No	Nama Pemotong	Jenis Penghasilan	Penghasilan (Rp)	PPh Dibayar/ Terutang di LN (Rp)	Perhitungan Batas Maksimal menurut UU PPh	PPh Pasal 24 yang Dapat Dikreditkan (Rp)
1						
	TOTAL					

# *BAB 3*

## **K**asus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 SS

---

### ***A.*** Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 SS

Embun (perempuan) merupakan pegawai tetap di PT Indonesia sebagai staf Administrasi dan Umum sejak 1 Agustus 2017, dengan status sudah menikah, suami tidak bekerja (di-PHK sejak September 2018) dan memiliki 3 orang anak. Untuk dapat menanggung suaminya yang tidak bekerja, Agustini menyertakan surat keterangan dari kelurahan tempat tinggalnya. Alamat tempat tinggal di jalan Tanjung Gg. Halilintar No. 10 Solo. NPWP: 77.503.335.7.322.000. Daftar susunan keluarga, data kewajiban yang dimilikinya sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

### Data Susunan Keluarga

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Subroto	12-10-1976	Suami	Tidak bekerja/ PHK
2.	Embun	02-05-1977	Istri	Pegawai
3.	Arya Subroto	07-07-2011	Anak Kandung	SMP
4.	Fina Subroto	05-06-2004	Anak Kandung	SD
5.	Mala Subroto	08-08- 2008	Anak Kandung	Balita

### Data Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (RP)	Keterangan
1.	Mobil (Inovi 2009)	2009	280.000.000	BPKB No. AD 3123 xx
2.	Motor Suzuka	2010	15.000.000	BPKB No. AD 2222 xx
3.	Rumah di jln. Tanjungan Gg. Halilintar No. 10 Solo	2010	200.000.000	NOP: 11.75.020.032. 008.0165.0
	Jumlah		495.000.000	

## Data Kewajiban

No	Nama dan Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Pinjaman	Jumlah Pinjaman (RP)	Keterangan
1.	Bank BCD Jl. Kartini No. Solo	2015	80.000.000	BPKB No. AD 3123 xx
	Jumlah		80.000.000	

PT Indonesia telah menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 berupa formulir 1721 A-1 kepada Embun.

## **B.** Instruksi Kerja

1. Kumpulkan (buatlah) bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2019.
2. Istilah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 SS Tahun Pajak 2019. Tanggal pelaporan bias dilihat pada Bab 1.

# BAB 4

## **K**asus PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Formulir 1770 S

---

### **A.** Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 S

Momon merupakan Manajer Pemasaran di PT Indonesia. Per 1 November 2019 Momon sudah tidak bekerja lagi di PT Indonesia karena memasuki masa pensiun. PT Indonesia beralamat di Jln.Monginsidi No. 24-25 Solo.NPWP: 01.385.537.4-322.000. Pada bulan Juli 2019 menerima Royalti atas penerbitan buku dengan judul Kewirausahaan yang ditulisnya sebesar Rp 5.000.000.00 dari penerbit PT selamat alamat Jl Raya No.102 Kebon Kelapa, Jakarta. NPWP 01.550.768.4-074.000 (bukti pemotongan terlampir).

Istri Momon Bernama Lilik adalah ManajerKeuangan di Bank ABATA yang memiliki NPWP mengikuti suami/cabang suami (bukti potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 terlampir). Bank ABATA beralamat di Jln.Kartini No. 45 Solo. NPWP: 01.308.464.5.322.000. Ibu Lilik mendapat hadiah undian berupa sepeda motor di bulan maret 2019 dari Yamaha

senilai Rp20.000.000 dari Supermarket Laris yang beralamat di Jl.Raya Natar No.56 Solo NPWP: 02.576.554.323.000, pajak ditanggung pemenang (bukti pemotongan terlampir).

Momon beralamat di Jln. Putting Beliung II No. 10 Solo. NPWP: 77.740.264.5.322.000. Nomor Telp. (0271) 657890. Berikut ini data mengenai susunan keluarga dan data hartanya sampai dengan 31 Desember 2019.

### Data Susunan keluarga

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1	Momon	22-08-1956	Suami	Kepala Rumah Tangga
2	Lilik	12-05-1964	Istri	Pegawai
3	Brahmana	09-03-1994	Anak Kandung	PNS Kementrian Keuangan
4	Putri	03-09-1994	Anak Kandung	Mahasiswa
5	Rere	05-05-1995	Anak Kandung	SMA



## Data Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Rumahdi Jln. Angin Mamiri II No.10 Solo	2005	185.000.00	NOP: 11.75.032.88 8.0865.0
2	Mobil Rust 2010	2011	200.000.000	BPKB No. BE 5888xx
3	Mobil Inova 2011	2012	240.000.000	BPKB No. BE 9999xx
4	Motor Supra S	2014	20.000.000	BPKB No. BE 7869xx
	Jumlah		645.000.000	

## B. Instruksi Kerja

- a) Kumpulkan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2019, baik penghasilan yang final maupun nonfinal.
- b) Menghitung PPh yang kurang/lebihbayar Tahun Pajak 2019 pada kertas kerja yang telah disediakan.
- c) Menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya (Tahun 2020) pada kertas kerja yang telah disediakan.

- d) Isilah surat setoran pajak (SSP) untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2020 dan Setoran di Bank.
- e) Isilah surat setoran pajak (SPP) apabila terdapat kurang bayar pajak tahun 2019 dan setoran di Bank.
- f) Isilah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S Tahun Pajak 2019.

## ***e.* Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan**

Kertas Kerja Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Mengisi Formulir 1770 S

- a. Perhitungan PPh Kurang/ (Lebih) Bayar

No	Deskripsi	Fiskal			SPT	Ket
		Objek Pajak		Non-objek Pajak		
		Non final	final			
1.	Penghasilan dari Pekerjaan					
2.	a. Pekerjaan dari.....					
	- Penghasilan Bruto					
	- Pengurang Penghasilan Bruto					

	- Penghasilan Neto					
	b. Pekerjaan dari.....					
	- Penghasilan Bruto					
	- Pengurangan Penghasilan Bruto					
	- Penghasilan Neto					
	Jumlah Penghasilan Neto Sehubungan dengan Pekerjaan					
2.	Penghasilan Lain-Lain					
	a.					
	b.					
	Jumlah Penghasilan Lain-Lain					
3.	Jumlah Penghasilan Neto					
4.	Zakat / Sumbangan Wajib Keagamaan					
5.	PTKP					
	- WP Sendiri					
	- Kawin					
	- Tanggungan					

6.	Penghasilan Kena Pajak					
7.	Penghasilan Kena Pajak Pembulatan					
8.	PPh Terutang					
	- 5% x					
	- 15% x					
	- 25% x					
	- 30% x					
9.	Kredit Pajak					
	a. PPh Dipotong/ Dipungut Pihak lain					
	-PPhPsl.....					
	-PPhPsl.....					
	b. PPh yang Harus Dibayar Sendiri					
	c. PPh Dibayar Sendiri					
	- PPh Psl 25					
	- STP PPh25					
10.	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar					

**b. Perhitungan Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya.**

<b>No</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Rupiah</b>
1.	Penghasilan neto tahun sebelumnya	
2.	Penghasilan tidak teratur	
3.	Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran	
4.	Zakat/sumbangan wajib keagamaan	
5.	Kompensasi kerugian	
6.	PTKP(K/2)	
7.	Penghasilan kena pajak	
8.	Penghasilan kena pajak dibulatkan	
9.	PPh yang terutang	
	- 5% x	
	- 15% x	
10.	Kredit pajak tahun lalu yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain	
11.	PPh yang harus dibayar sendiri	
12.	PPh pasal 25	

# *BAB 5*

## **K**asus PPh Wajib Pajak Orang

### **Pribadi untuk Formulir 1770 NPPN**

---

#### ***A.* Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 NPPN**

Bapak Danu adalah manajer produksi PT. Indonesia sejak 1 Mei 2015 ( bukti pemotongan PPh Pasal 21 terlampir ). Alamat tempat tinggal dan usaha di Jln.Tunas Bangsa Gg.Aduhai I No.10 Solo. Telp dan Faks.(0271) 484573.NPWP: 88.306.089.9.325.000.

Istrinya, NyMaya, adalah seorang dokter di salah satu RS Swasta di Solo (bukti pemotongan PPh Pasal 21 terlampir), dan membuka praktik sendiri di Jln.Umar Said No. 45 Solo.NPWP mengikuti suami / cabang suami.Sebagai warga negara yang baik Ny. Maya selalu melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan, yaitu dengan melaporkan usahanya setiap akhir masa pajak dengan menggunakan Norma PenghitunganNetto. Kode KLU 93213 dengan norma

42,5%. Hasil praktik yang di dapat selama tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Bulan	Peredaran Usaha	No	Bulan	Peredaran Usaha
1.	Januari	Rp 25.000.000	7.	Juli	Rp 15.000.000
2.	Februari	Rp 23.500.000	8.	Agustus	Rp 32.500.000
3.	Maret	Rp 20.000.000	9.	September	Rp 58.900.000
4.	April	Rp 40.000.000	10.	Oktober	Rp 40.000.000
5.	Mei	Rp 54.500.000	11.	November	Rp 45.800.000
6.	Juni	Rp 60.000.000	12.	Desember	Rp 35.000.000
Jumlah					Rp 450.200.000

Pada September 2019, mereka mendapatkan pendapatan sewadari Ruko di RA. Kartini No. 10 Solo sebesar Rp10.000.000 untuk 1 tahun. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah setiap tahun baik Danu maupun Maya selalu menyeter zakatnya ke Badan Amil Zakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah masing-masing 2,5% dari seluruh penghasilan neto keduanya selama tahun 2019 (baik dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, dari usaha, dan penghasilan lain-lain).

Angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No.	Masa/ Bulan	Jumlah Angsuran (Rp)	No	Masa/Bulan	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Januari	2.800.000	7.	Juli	2.800.000
2.	Februari	2.800.000	8.	Agustus	2.800.000
3.	Maret	2.800.000	9.	September	2.800.000
4.	April	2.800.000	10.	Oktober	2.800.000
5.	Mei	2.800.000	11.	November	2.800.000
6.	Juni	2.800.000	12.	Desember	2.800.000
	Jumlah				33.600.000

#### Data Susunan Keluarga

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Danu	22-08-1969	Suami	Kepala RumahTangg a
2.	Maya	12-05-1971	Istri	Pegawai/ Bebas
3.	Putri Danutirta	09-03-1998	Anak Kandung	SMA
4.	Putra Danutirta	09-03-1998	Anak Kandung	SMA
5.	Surti	12-01-1995	Pembantu	-



## Daftar Harta

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Mobil Nisan Teranos	2009	200.000.000	BPKB No. AD1234 xx
2.	Mobil Inova 2011	2012	240.000.000	BPKB No. AD 5555 xx
3.	Rumah di Tunas Bangsa Gg. Aduhai I No. 10 Solo	2000	170.000.000	NOP: 11.66.032.032.5 55.0555.0
4.	Ruko Jln. RA.Kartini No. 10 Solo	2008	50.000.000	Disewakan/usa ha
5.	Tanah	2000	1.000.000.000	Warisan
	Jumlah		1.660.000.000	

## Daftar Kewajiban

No.	Kewajiban	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
-----	-----------	-----------------	----------------------	------------

1.	Pinjaman Usaha di Bank BINI	2010	100.000.000	Kewajiban
	Jumlah		100.000.000	

## **3. Instruksi Kerja**

1. Kumpulkan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama tahun 2019, baik penghasilan yang final maupun non final.
2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Kurang/Lebih Bayar Tahun Pajak 2019 pada kertas kerja yang telah disediakan.
3. Menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya (Tahun 2020) pada kertas kerja yang telah disediakan.
4. Isilah surat setoran pajak (SSP) untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 Masa Maret 2020 dan setorkan di Bank BINI.
5. Isilah surat setoran pajak (SSP) apabila terdapat kurang bayar pajak Tahun Pajak 2019 dan setorkan di Bank BINI.
6. Isilah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 Tahun Pajak 2019

## **e. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan**

Kertas Kerja Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Mengisi Formulir 1770 Norma Penghitungan Neto

### a. Perhitungan PPh Kurang/(Lebih) Bayar

No	Deskripsi	Fiskal			SPT	Ket
		Objek Pajak		Non-objek Pajak		
		Non final	final			
1.	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas					
	- Peredaran Usaha					
	- Norma					
	- Penghasilan Neto					
	Jumlah Penghasilan Neto dari Usaha/ Pekerjaan Bebas					
2.	Penghasilan dari Pekerjaan					
	a. Pekerjaan dari ....					
	- Penghasilan					

	Bruto					
	- Pengurang Penghasilan Bruto					
	- Penghasilan Neto					
	b. Pekerjaand ari ....					
	- Penghasilan Bruto					
	- Pengurang Penghasilan Bruto					
	- Penghasilan Neto					
	Jumlah Penghasilan Neto dari Pekerjaan					
3.	Penghasilan lain-lain					
	a.					
	b.					
	Jumlah Penghasilan Lain-lain					
4	Jumlah Penghasilan Neto					
5.	Zakat/ Sumbangan Wajib Keagamaan					
6.	Jumlah Penghasilan					

	Neto setelah Dikurangi Zakat					
7.	PTKP					
	- WP Sendiri					
	- Kawin					
	- Tambahan Istri Penghasilan					
	- Tanggungan					
8.	Penghasilan Kena Pajak					
	Penghasilan Kena Pajak Pembulatan					
9	PPh Terutang					
	- 5% x					
	- 15% x					
	- 25% x					
	- 30% x					
10.	Kredit Pajak					
	a. PPh Dipotong/ Dipungut Pihak Lain					
	- PPhPsl ....					
	- PPhPsl ....					
	b. PPh yang Harus Dibayar Sendiri					
	c. PPh Dibayar Sendiri					
	- PPhPsl 25					

	- STP PPh 25					
11.	PPh Kurang/ (Lebih) Bayar					

b. Penghitungan angsuran PPh 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya

No.	Deskripsi	Rupiah
1.	Penghasilan neto tahun sebelumnya	
2.	Penghasilan tidak teratur	
3.	Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pengangguran	
4.	Zakat/sumbangan wajib keagamaan	
5.	Kompetensi Kerugian	
6.	PTKP	
7.	Penghasilan kena pajak	
8.	Penghasilan kena pajak dibulatkan	
9.	PPh yang terutang	
	- 5% x	
	- 15% x	
	- 25% x	
10.	Kredit pajak tahun lalu yang dipotong/dipungut oleh pihak lain	
11.	PPh yang harus dibayar sendiri	
12.	PPh Pasal 25	

# *BAB 6*

## **K**asus PPh Wajib Pajak Orang

### **Pribadi untuk Formulir 1770 Pembukuan**

---

#### ***A.* Orang Pribadi yang Mengisi Formulir 1770 Pembukuan**

Selain sebagai Direktur PT Indonesia, Hasan juga memiliki usaha keluarga di bidang perdagangan dengan nama Mandiri Jaya didirikan sejak awal tahun 2018 yang dikelola Bersama istrinya Ny. Intan sebagai manajer operasional. Perusahaan menggunakan system periodic dalam perhitungan persediaannya. Peredaran usaha di tahun 2018 mencapai Rp5.200.000.000.

Berikut adalah data laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

No.	Deskripsi	LKK (Rp)
1.	Penjualan Bersih	
	a. Penjualan	9.072.000.000
	b. Potongan Penjualan	(324.000.000)
	Jumlah Penjualan Bersih	8.748.000.000
2.	Harga Pokok Penjualan	
	a. Persediaan Awal	12.000.000
	b. Pembelian	5.468.000.000
	Barang Tersedia Untuk Dijual	5.480.000.000
	c. Persediaan Akhir	(360.000.000)
	Jumlah Harga Pokok Penjualan	5.120.000.000
3.	Laba Bruto (1-2)	3.628.000.000
4.	Biaya Operasional	
	a. Biaya SDM	666.732.300
	b. Biaya Sewa	679.200.000
	c. Biaya Listrik dan Telepon	151.200.000
	d. Biaya Perlengkapan	62.400.000
	e. Biaya Kantor	86.400.000
	f. Biaya Pemasaran	420.000.000
	g. Biaya Kerugian Piutang	50.000.000
	h. Penyusutan Peralatan	239.360.000
	i. Penyusutan Kendaraan	77.440.000
	j. Biaya Lain-Lain	12.907.700
	Jumlah Biaya Operasional (a+j)	(2.445.640.000)
5.	Laba Neto Usaha (3-4)	1.182.360.000



## Keterangan:

### 1. Perincian biaya SDM adalah:

a. Gaji Ny.Intan	Rp 60.000.000
b. Gaji pegawai	Rp 412.072.800
c. Biaya konsumsi seluruh pegawai di tempat kerja	Rp 64.800.000
d. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan	Rp 859.500
e. Biaya perjalanan dinas (tiket, akomodasi)	Rp 120.000.000

2. Dalam biaya listrik dan telepon termasuk biaya listrik dan telepon rumah Hasan sebesar Rp12.000.000.

3. Piutang usaha dilakukan penghapusan sebesar Rp50.000.000. Penghapusan tersebut tidak didaftarkan di pengadilan negeri serta tidak diumumkan dalam penerbitan. Dokumen biaya kerugian piutang adalah berita acara penghapusan dan daftar kerincian penghapusan.

### 4. Perincian biaya lain-lain adalah:

a. Biaya <i>entertainment</i> tidak dibuatkan daftar nominatif	Rp 1.600.000
b. Sumbangan beasiswa dengan ikatan dinas	Rp 4.000.000
c. Perbaikan kendaraan dinas manajer perusahaan	Rp 5.000.000
d. Perbaikan lapangan olahraga	Rp 2.000.000
e. Lain-lain tidak diperinci	Rp 307.700

5. Dalam penyusutan asset tetap secara komersial menggunakan metode saldo menurun dengan masa manfaat 5 tahun tanpa nilai residu. Kendaraan digunakan untuk kendaraan dinas menejer. Seluruh asset tetap diperoleh tanggal 23 April 2018. Untuk keperluan perpajakan, aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Peralatan termasuk kelompok 1, sedangkan kendaraan termasuk kelompok 2.
6. Bulan Oktober 2019, Hasan menerima pembagian deviden atas penyertaan saham 25% di PT Indonesia (NPWP: 01.385.537.4-322.000) sebesar Rp12.500.000 yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) bukti pemotongan terlampir.
7. Hasan telah menerima bukti pemotongan atas penghasilan yang diterimanya sebagai pegawai di PT Texindo Raya Indonesia (Formulir 1721-A1) pada 10 Januari 2019(terlampir)
8. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor selama 2019 adalah sebagai berikut.

No .	Masa/ Bulan	Jumlah Angsuran (Rp)	No.	Masa/ Bulan	Jumlah Angsuran (Rp)
1.	Januari	25.000.000	7.	Juli	31.700.000
2.	Februari	25.000.000	8.	Agustus	31.700.000
3.	Maret	31.700.000	9.	September	31.700.000
4.	April	31.700.000	10.	Oktober	31.700.000
5.	Mei	31.700.000	11.	November	31.700.000
6.	Juni	31.700.000	12.	Desember	31.700.000
	Jumlah				367.000.000

## Identitas Hasan

Nama Wajibpajak : Hasan  
NPWP : 04.142.579.4.322.000  
Alamat TempatTinggal : Jln. Jend.Sudirman No.10Solo  
Telp/Fax : (0271) 714583  
Alamat Tempat Usaha : Jln. Kartini No.69 Solo  
Telp/Fax : (0271) 583333/(0721) 583334  
No Kode KLU : 3262200

## Data Susunan Keluarga

No	Nama	Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Keterangan
1.	Hasan	22-08-1965	Suami	Kepala Rumah Tangga
2.	Intan	25-05-1967	Istri	Usaha Bebas
3.	Viki	08-08-1991	Anak Kandung	Pegawai Bank di Jerman
4.	Sintia	09-09-1995	Anak Kandung	Mahasiswa
5.	Aurelia	09-09-1999	Anak Kandung	SMA
6.	Satrio	25-05-2014	Anak Angkat	Lahir 25 Mei 2014
7.	Inah	05-02-1999	Pembantu	-

## Daftar Harga

N o	Jenis Harta / Kewajiban	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Mobil Nissan Terano	2010	400.000.000	BPKB No. AD 7474xx (Pribadi)
2.	Mobil Inova 2012	2012	260.000.000	BPKB No. AD 3456xx (Pribadi)
3.	Mobil Toyota Sedan	2013	264.000.000	BPKB No. AD 7352xx (Usaha)
4.	Rumah di Jln. Jend. Sudirman No. 10 Solo	1999	250.000.000	NOP: 11.67.302.032.65 5.0555.0
5.	Peralatan Usaha	2013	816.000.000	Usaha
6.	Saham	2005	250.000.000	PT Indonesia (25%)
	Jumlah		2.240.000.000	

## Daftar Kewajiban

No	Kewajiban	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	Bank CBA Cab.Tj.Karang. Jl. Kartini No. 78 Bandar Lampung	2019	500.000.000	Usaha
	Jumlah		500.000.000	

## **B. Instruksi Kerja**

1. Kumpulkan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima selama 2019, Baik penghasilan yang final maupun nonfinal.
2. Menyusun rekonsiliasifiskal tahun pajak 2019 pada kertas kerja yang telah disediakan.
3. Menghitung penyusutan asset tetap menurut fiscal tahun pajak 2019 pada kertas kerja yang telah disediakan.
4. Menghitung pajak penghasilan (PPh) Kurang/lebih bayar tahun pajak 2019 pada kertas kerja yang telah disediakan.
5. Menghitung angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya (tahun 2020) pada kertas kerja yang telah dikerjakan.
6. Isilah surat setoran pajak (SSP) untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 masa Maret 2020 dan setorkan di Bank BNI.
7. Isilah surat setoran pajak (SSP) apabila terdapat kurang bayar pajak tahun pajak 2019 dan setorkan di Bank BNI.
8. Isilah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 tahun pajak 2019.

## **e. Kertas Kerja dan Formulir Perpajakan**

Kertas Kerja Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengisi  
Formulir 1770 Pembukuan

### **a. Rekonsiliasi Fiska Tahun Pajak 2019**

No	Deskripsi	LKK	Koreksi		LK F	SPT	Ket
			Positif	Negatif			
1.	Penjualan Bersih						
	a. Penjualan						
	b. Potongan Penjualan						
	Jumlah Penjualan (a-b)						
2.	Harga Pokok Penjualan						
	a. Persediaan Awal						
	b. Pembelian						
	c. Barang Tersedia Untuk Dijual (a+b)						
	d. Persediaan Akhir						
	Jumlah Harga Pokok						

	penjualan (c-d)						
3.	LabaBruto (1-2)						
4.	Biaya Operasional						
	a. Biaya SDM						
	b. Biaya Sewa						
	c. Biaya Listrik dan Telepon						
	d. Biaya Perlengkapan						
	e. Biaya Kantor						
	f. Biaya pemasaran						
	g. Biaya kerugian Piutang						
	h. Penyusutan Peralatan						
	i. Penyusutan Kendaraan						
	j. Biaya Lain-Lain						
	Jumlah Biaya Operasional (a+i)						
5.	Laba Neto Usaha (3-4)						

b. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Fiskal

1. Perhitungan Penyusutan Peralatan menurut Pajak  
(Metode Garis Lurus) Kel I

Thn	Tarif Penyusutan (%)	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal (Rp)	Jumlah (Bulan)

2. Perhitungan Penyusutan Kendaraan menurut Pajak  
(Metode Garis Lurus) Kel II

Thn.	Tarif Penyusutan (%)	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa Buku Fiskal (Rp)	Jumlah (Bulan)



c. Perhitungan Perhitungan PPh Kurang/(lebih) Bayar

No	Deskripsi	Fiskal			SPT	Ket
		Objek Pajak		Non-objek Pajak		
		Non final	final			
1.	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas					
	- Jumlah penghasilan Neto dari Usaha/Pekerjaan Bebas					
2.	Penghasilan dari Pekerjaan					
	Pekerjaan dari...					
	- Penghasilan Bruto					
	- Pengurangan Penghasilan Bruto					
	- Penghasilan Neto					
	Jumlah penghasilan Neto dari Pekerjaan					
3.	Penghasilan lain-lain					
	-					

	-					
	Jumlah Penghasilan lain-lain					
4.	Jumlah penghasilan Neto					
5.	Zakat/Sumbangan wajib keagamaan					
6.	Jumlah Penghasilan Neto setelah dikurangi Zakat					
7.	PTKP					
	- WP Sendiri					
	- Kawin					
	- Tanggungan					
8.	Penghasilan Kena Pajak					
	Penghasilan Kena Pajak pembulatan					
9.	PPh Terhutang					
	- 5% x					
	- 15% x					
	- 25% x					
	- 30% x					
10.	Kredit Pajak					
	a. PPh Dipotong/ Dipungut Pihak Lain					
	- PPh Pasal ...					

	- PPh Pasal ...					
	b. PPh yang Harus Dibayar Sendiri					
	c. PPh Dibayar Sendiri					
	- PPh Psl 25					
	- STP PPh 25					
11.	PPh Kurang/(Lebih) Bayar					

d. Penghitungan Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pajak Berikutnya

No.	Deskripsi	Rupiah	Ket.
1.	Penghasilan Neto Tahun Sebelumnya		
2.	Penghasilan tidak teratur		
3.	Penghasilan yang menjadi dasar penghitung angsuran		
4.	Zakat/Sumbangan wajib keagamaan		
5.	Kompesasi Kerugian		
6.	PTKP		
7.	Penghasilan kena pajak		
8.	Penghasilan kena pajak Dibulatkan		
9.	PPh yang Terutang		
	- 5% x		

	- 15% x		
	- 25% x		
	- 30% x		
10.	Kredit Pajak tahun lalu yang dipotong/dipungut oleh pihak lain		
11.	PPH yang harus dibayar sendiri		
12.	PPH pasal 25		

**PT. TEKINDO RAYA INDONESIA**  
**Daftar Perhitungan Penyusutan Aset Tetap**  
**Tahun Pajak 2014**  
**( Metode Garis Lurus )**

Ases Tetap	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan	Umur Fisikal ( Tahun )	%	Jumlah Pemakaian s.d Des 2013 ( Tahun )	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2013	Nilai Buku Per 31 Desember 2013	Beban Fisikal tahun 2014	Nilai Buku Per 31 Desember 2014	Ket
BANGUN PERMANEN										
Pabrik A ( ST Lateks )										
Pabrik B ( ST Rajut )										
Kantor										
Total Bangunan Permanen										
KELOMPOK 1										
Furniture & Fixture										
Computer/Printer										
Telepon Seluler										
Total Kelompok 1										
KELOMPOK 2										
Mesin Pabrik A										
Mesin Pabrik B										
Sedan										
Total Kelompok 2										
KELOMPOK 3										
Mesin Pabrik A										
Mesin Pabrik B										
Mesin Diesel										
Generator Listrik										
Total Kelompok 3										
<b>TOTAL</b>										

Diskripsi	komersial	SPT	Koreksi Fiskal		Bukan Obyek Pajak ( Rp )	SPT	Fiskal ( Rp )	Ket
			positif	Negatif				
C. LABA USAHA BRUTO								
D. BAHAN USAHA								
1 Gaji, THR dan Bonus								
2 Premi dan Asuransi								
3 Perjalanan Dinas								
4 ATK								
5 Listrik, Teipon, Air Perusahaan								
6 Telepon/ Teleks								
7 Cadangan Piutang Tak Tertagih								
8 Penghapusan Piutang Tak Tertagih ( Memenuhi Syarat Psi.6 ( 1 ) h								
9 Pinjaman Bank Sendiri								
10 Sewa Mesin								
11 Reparasi								
12 Jasa Profesional								
13 Pembayaran Royalti kepada PT. Andersen								
14 Pengangkutan								
15 Penyusutan								
16 Pemasaran/Promosi								
17 Kerugian Fiskal Tahun 2008								
18 Lain -lain								
Jumlah Beban Usaha								
E. LABA USAHA NETO								
F. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA :								
1 Bunga Deposito dari Bank Sendiri								
2 Dividen dari PT. Hilaman Jaya ( 15 % )								
3 Dividen dari PT. Sindo Textile ( 25 % )								
4 Keuntungan atas Penjualan Tanah								
5 Laba Selisih Kurs								
Jumlah Penghasilan dari Luar Usaha								
G. PENGHASILAN DARI DALAM NEGERI								
H. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI								
1 Dividen dari Timor Leste Co.								
I. LABA SEBELUM PAJAK								

Diskripsi	komersial	SPT	Koreksi Fiskal		Bukan Obyek Pajak (Rp)	SPT	Fiskal (Rp)	Ket
			positif	Negatif				
C. LABA USAHA BRUTO								
D. BAHAN USAHA								
1 Gaji, THR dan Bonus								
2 Premi dan Asuransi								
3 Perjalanan Dinas								
4 ATK								
5 Listrik, Telpon, Air Perusahaan								
6 Telepon/Teleks								
7 Cadangan Piutang Tak Tertagih								
8 Penghapusan Piutang Tak Tertagih (Memenuhi Syarat Psi.6 (1) h								
9 Pinjaman Bank Sendiri								
10 Sewa Mesin								
11 Reparasi								
12 Jasa Profesional								
13 Pembayaran Royalti kepada PT. Andersen								
14 Pengangkutan								
15 Penyusutan								
16 Pemasaran/Promosi								
17 Kerugian Fiskal Tahun 2008								
18 Lain-lain								
Jumlah Beban Usaha								
E. LABA USAHA NETO								
F. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA :								
1 Bunga Deposito dari Bank Sendiri								
2 Dividen dari PT. Hilaman Jaya (15%)								
3 Dividen dari PT. Sindo Textile (25%)								
4 Keuntungan atas Penjualan Tanah								
5 Laba Selisih Kurs								
Jumlah Penghasilan dari Luar Usaha								
G. PENGHASILAN DARI DALAM NEGERI								
H. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI								
1 Dividen dari Timor Leste Co.								
I. LABA SEBELUM PAJAK								

8. Perhitungan PPh yang Terutang dan PPh yang kurang ( lebih ) Disetor Tahun Pajak 2014

A. Penghasilan Kena Pajak		
1 .	Penghasilan Neto Fiskal	Rp
2 .	Kompentensi Kerugian	Rp
3 .	Kompentensi Kena Pajak	Rp
4 .	Kompentensi Kena Pajak ( dibulatkan )	Rp
B. PPh yang Terutang		
		Rp
C. Kredit Pajak		
1 .	PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain/terutang di LN	
a.	Kredit Pajak dalam negeri	
	-	Rp
	-	Rp
	-	Rp
	Jumlah	Rp
b.	Kredit Pajak luar negeri	
	-	Rp
	-	Rp
	Jumlah	Rp
	Jumlah kredit pajak	Rp
2 .	PPh yang masih harus disetor sendiri	Rp
3 .	PPh yang dibayar sendiri selama tahun pajak 2014	
a.	Angsuran PPh Pasal 25	Rp
b.	STP Angsuran PPh Pasal 25	Rp
		Rp
D. PPh Kurang ( lebih ) Dibayar Tahun 2014		Rp

9. Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Setiap Bulan ( PPh Pasal 25 ) Tahun Pajak 2015

Penghasilan sebagai dasar pengenaan angsuran		
Penghasilan neto fiskal tahun 2014		Rp
	-	Rp
	-	Rp
		Rp
Penghasilan sebagai dasar pengenaan angsuran		Rp
Penghasilan sebagai dasar pengenaan angsuran ( dibulatkan )		Rp
PPh sebagai dasar penghitungan angsuran :		
		Rp
Kredit Pajak Tahun 2014 ( tidak termasuk yang dibayar sendiri ) :		
PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dan dibayar/terutang di LN		
	-	Rp
	-	Rp
	-	Rp
	-	Rp
	Total kredit pajak	Rp
PPh serbagai dasar penghitungan angsuran :		Rp
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2015 Per bulannya adalah :		
		Rp



FORMULIR

**1770 S - I**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2 0

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**  
(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bunga	
2	Dividen	
3	Royalti	
4	Sewa	
5	Penghargaan dan Hadiah	
6	Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta	
7	Penghasilan Lainnya	
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>		<b>JBA</b>

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>JBB</b>

**BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH**

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
dst						
<b>JUMLAH BAGIAN C</b>					<b>JBC</b>	

Catatan :

\*) -DTP- Ditanggung Pemerintah

- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (2)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-  dan  halaman Lampiran-I





FORMULIR

**1771 - V**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - V**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAMU PAJAK

2 0

IDENTITAS	N P W P	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>
	PERIODE PEMBUKUAN	<input type="text"/> s.d. <input type="text"/>

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rp/ah)
				(Rp/ah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA		100%	

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPLI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI  
D.1.1.32.35

Halaman ke-  dari  halaman Lampiran-V



**1771 - III**  
 RESITASI PENGHASILAN  
 ORISINAL JABATAN PAJAK

**LAMPIRAN - III**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

TAHUN PAJAK 20

IDENTITAS : NAMA :  NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODIC PEMBUNGAN :  s.d.

NO	NAMA (G)	NPWP (G)	JENIS PEMONGKON/PENGESKAPAN TRANSAKSI (G)	JUMLAH (Rp/mt) (G)	JUMLAH PERSENTASI YANG DIPOTONG/DIPANGKUT (Rp/mt) (G)	Bukti Pengecukupan / Pengesahan / Pengesahan Nomor (G)	TANGGAL (G)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
<b>JUMLAH</b>						<b>JML</b>	

Keterangan:  
 • Ditisi dengan isian per Bulan Pemotongan / Pemengakan Pajak.  
 • Pengecukupan dan pengesahan (PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 28) Kotor (G) dan Formulir 1771 Hukuf C Angka 1.a.

**JIKA FORMULIR INI TAK MENCUKUR, DAPAT DEWAT SENDIRI BERSAMA DENGAN BENTUK INI**

Halaman ke-  dari  Halaman Lampiran-III

D.1.1.32.3

FORMULIR  
**1771 - II**  
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL**

TAHUN PAJAK

2 0

IDENTITAS	N P W P	PERIODE PEMBUKUAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
			(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
		PERINCIAN				
1.		PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN				
2.		GALI UPAN, BONUS, GRATIFIKASI, PROPORSIUM, TPK, DSB				
3.		BIAYA TRANSPORTASI				
4.		BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.		BIAYA SEWA				
6.		BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.		BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.		BIAYA PIUTANG TAK TERTAGH				
9.		BIAYA ROYALTI				
10.		BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.		BIAYA LAINNYA				
12.		PERSEDIAAN AWAL				
13.		PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
14.		JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANG 13				

Catatan :  
 • Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisiahkan barang dagangan untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
 • Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.  
 • Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.  
 • Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang selangan jika ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

IDENTITAS	N P W P :	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>
	PERIODE PEMBUKUAN :	<input type="text"/> s.d. <input type="text"/>

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ) .....	1g
h.	JUMLAH ( 1d + 1g ) : .....	1h
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .....	2
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</b> .....	3
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN Pph FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUKUPAN DANA CADANGAN .....	5b
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b> TAHUN KE - <input type="text"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7d
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</b> .....	8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31





SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENYISIP, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
• IS DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TITIK HITAM  
• BERI TANDA "X" PADA  KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0

SPT PEMEBETLAN KE...

IDENTITAS	N P W P	<input type="text"/>												
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>												
	JENIS USAHA	<input type="text"/>												
	NO. TELEPON	<input type="text"/>						NO. FAKS	<input type="text"/>					
	PERIODE PEMBUKUAN	<input type="text"/> s.d. <input type="text"/>												
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	<input type="text"/>												

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/>	DIAUDIT	<input type="checkbox"/>	OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/>	TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	<input type="text"/>					
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	<input type="text"/>					
NAMA AKUNTAN PUBLIK	<input type="text"/>					
N P W P AKUNTAN PUBLIK	<input type="text"/>					
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	<input type="text"/>					
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	<input type="text"/>					
NAMA KONSULTAN PAJAK	<input type="text"/>					
NPWP KONSULTAN PAJAK	<input type="text"/>					

\*1 Pengisian kolom-kolom yang bernomor rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh perubahan lihat buku petunjuk hal. 3)

		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5		
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6		
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 8) .....	8a	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .....	8b	
	c. JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 – 7 – 8c).....	9	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a	
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b		
c. JUMLAH ( 10a + 10b) .....	10c		
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 – 10c).....	11	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu; b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	<input type="text"/>	<input type="text"/>



STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

**1770 SS**

**PERHATIAN :**

- SEBELUM MENGRIS BACA DAMAJU PETUNJUK PENGISIAN
- ISIDENGAN HURUF CETAK/DETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERTANDA 'X' PADA  KOTAK PILIHAN YANG SESUAI



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

H.03

**2 0**

**SPT TAHUNAN**

**PAJAK PENGHASILAN**  
**WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

H.01  SPT PEMBETULAN KE H.02 \* ....

DIISI OLEH PETUGAS KPP  
BARCODE DITEMPEL DISINI

FORMULIR INI DIPERUNTUKKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS  
WAJIB PAJAK

NPWP I.01 : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
NAMA WAJIB PAJAK I.02 : \_\_\_\_\_

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

**A. PAJAK PENGHASILAN**

1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1	A.01	<input type="text"/>
2	Pengurangan (Diisi jumlah pengurangan dari Formulir 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13)	2	A.02	<input type="text"/>
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak TK/ A.03 <input type="checkbox"/> K/ A.04 <input type="checkbox"/> K/II/ A.05 <input type="checkbox"/> (Diisi jumlah PTKP dari Formulir 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16)	3	A.06	<input type="text"/>
4	Penghasilan Kena Pajak ( 1 - 2 - 3 )	4	A.07	<input type="text"/>
5	Pajak Penghasilan Terutang	5	A.08	<input type="text"/>
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6	A.09	<input type="text"/>
7	a. A.10 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri * ( 5 - 6 ) b. A.11 <input type="checkbox"/> Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7	A.12	<input type="text"/>

**B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK**

8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8	B.01	<input type="text"/>
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9	B.02	<input type="text"/>
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10	B.03	<input type="text"/>

**C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN**

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11	C.01	<input type="text"/>
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12	C.02	<input type="text"/>

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

P.01    dd    -    mm    -    yyyy

TAHDA TANGAN

\* Apabila terdapat Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus melampirkan asli SSP lembar ke-3

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
SANGAT SEDERHANA  
(Formulir SPT 1770 SS)**

**PETUNJUK UMUM**

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak yang:
  - a. mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
  - b. jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun

Batasan penghasilan bruto tersebut meliputi keseluruhan penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja.

Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, penghasilan dimaksud adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak, namun tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21, apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).

Dalam hal Wajib Pajak telah kawin, namun:

- a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

penunahan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan isteri secara terpisah. Dalam hal ini, isteri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Suami-isteri yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun, namun memiliki status perpajakan PH atau MT wajib melaporkan penghasilan dan penghitungan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S, bukan menggunakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS ini.

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.
- dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (bukan 10.000.000,00) atau dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (bukan 125,50).
- kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- Wajib Pajak tidak perlu melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 atau 1721 A2)

**PETUNJUK KHUSUS**

**Tahun Pajak**

Kolom Tahun Pajak diisi dengan tahun pajak yang sesuai. Contoh: Atas pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014, maka kolom tahun pajak diisi dengan 2014.

**SPT Pembetulan ke- ....**

Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan kolom Ke- ... diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Pembetulan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan kolom Ke- ... tersebut tidak perlu diisi.

**Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nama Wajib Pajak**

Kolom ini diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dan nama Wajib Pajak.

**A. Pajak Penghasilan**

**1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya**

- a. Jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dapat diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 9 atau 1721-A2 angka 10 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final). Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka kolom ini diisi dengan hasil penjumlahan dari keseluruhan penghasilan bruto yang tercantum pada setiap bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya.

Catatan:

Tidak termasuk penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK). Penghasilan ini dimasukkan dalam Bagian B Nomor 8: **Dasar Pengenaan Pajak/ Penghasilan Bruto Penghasilan Final**.

- b. Penghasilan neto dalam negeri lainnya di antaranya meliputi royalti, sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah perlombaan, keuntungan pengalihan harta dll.

**2. Pengurangan**

Pengurangan ini merupakan pengurangan atas penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang meliputi biaya jabatan, biaya pensiun serta iuran pensiun dan iuran THT

yang dibayarkannya oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kolom ini dapat diisi dengan jumlah pengurangan yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 13.

Catatan:

Tidak termasuk pengurangan atas penghasilan isteri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 apabila pemenuhan kewajibannya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga (KK).

### 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kolom ini diisi dengan jumlah PTKP yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 17 atau 1721-A2 angka 16.

TK : tidak kawin

K : kawin

K/I : kawin, isteri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami

Berdasarkan status Anda, isilah kotak yang terdapat pada sebelah kanan status tersebut dengan angka banyaknya jumlah tanggungan, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini tabel besarnya PTKP dalam setiap status dan banyaknya tanggungan:

Status	PTKP
TK/0	24.300.000
TK/1	26.325.000
TK/2	28.350.000
TK/3	30.375.000

Status	PTKP
K/0	26.325.000
K/1	28.350.000
K/2	30.375.000
K/3	32.400.000

Status	PTKP
K/I/0	50.625.000
K/I/1	52.650.000
K/I/2	54.675.000
K/I/3	56.700.000

PTKP bagi masing-masing suami-isteri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

### 4. Penghasilan Kena Pajak

Kolom ini diisi dengan hasil penghitungan atas kolom pada angka 1 - 2 - 3

Untuk keperluan penghitungan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

### 5. Pajak Penghasilan Terutang (PPh Terutang)

Kolom ini diisi dengan penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak, sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Jika penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, kolom ini diisi dengan jumlah PPh terutang yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 13 atau 1721-A2 angka 18.

### 6. Pajak Penghasilan yang sudah dipotong oleh pihak lain

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dipotong yang tercantum pada bukti pemotongan PPh 1721-A1 angka 22, 1721-A2 angka 19 dan/atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 (yang tidak bersifat final).

### 7. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri atau Pajak Penghasilan yang lebih dipotong

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri dan lampirkan asli SSP lembar ke-3 apabila nilai pada angka 5 lebih besar dibandingkan dengan nilai pada kolom 6.

Beri tanda silang pada kotak Pajak Penghasilan yang lebih dipotong apabila nilai pada angka 6 lebih besar dibandingkan nilai pada kolom 5. Kolom rupiah diisi dengan selisih antara nilai pada angka 5 - 6.

## B. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

### 8. Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Penghasilan Final

Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh final meliputi bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari honorarium atas beban APBN/APBD, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari persewaan atas tanah dan/atau bangunan, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dividen, penghasilan isteri dari satu pemberi kerja, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.

### 9. Pajak Penghasilan Final terutang

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh Final yang terutang.

### 10. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak meliputi bantuan/sumbangan/hibah, warisan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penggantian atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan, beasiswa.

## C. Daftar Harta dan Kewajiban

### 11. Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak

Kolom ini diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai Wajib Pajak dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contoh : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

### 12. Jumlah Keseluruhan Kewajiban/utang pada Akhir Tahun Pajak

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki Wajib Pajak dan anggota keluarganya, termasuk utang bunga. Contoh: pinjaman bank atau koperasi.

Dalam hal Isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim (HB), harta dan kewajiban/utang usaha serta harta dan kewajiban/utang non-usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai isteri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi isteri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

# Daftar Pustaka

---

Mardiasmo. 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta

Munawir S. 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Liberty Yogyakarta

Resmi, Siti. 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly, 2006, Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Suandy, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta

<https://app.online-pajak.com>

# Profil Penulis

---

*Fadjar Harimurti SE.MSi.Ak. CA*



Penulis lahir di Malang Jawa Timur pada tahun 1971. ia berhasil menamatkan studi pada program Magister Akuntansi dari Universitas Sebelas Maret. Ia lantas memulai karir sebagai dosen di Universitas Slamet Riyadi, dan mendapat amanah untuk mengajar di ProgdI Akuntansi sejak tahun 1996. Mata Kuliah yang diampu selama mengajar adalah Perpajakan, Aplikasi Perpajakan, Akuntansi Keuangan, Teori Akuntansi. Sebelum menjadi Tenaga Pengajar, penulis juga pernah bekerja sebagai staf Accounting and Tax pada PT Variety Malang. Pengalaman kerja ini semakin menambah kapabilitasnya dalam mengajar. Karya berupa buku yang pernah diterbitkan penulis adalah Perpajakan tahun 2018.





Buku “Modul Laboratorium Pratikum Perpajakan” ini merupakan panduan belajar bagi mahasiswa untuk mata kuliah modul laboraratorium praktikum perpajakan. Di dalam buku ini, disajikan materi lengkap yang diharapkan dapat menjadi panduan praktikum perpajakan bagi mahasiswa, meliputi perpajakan untuk wajib pajak pribadi maupun badan. Buku modul ini juga berisi berbagai penjelasan dan keterangan yang disusun secara sederhana sehingga mudah dipahami, sekaligus berisi contoh-contoh kasus untuk mempermudah pemahaman mahasiswa dalam belajar dan praktik perpajakan.



Jalan Sumpah Pemuda No 18, Joglo,  
Banjarsari, Kota Surakarta  
[press.unisri.ac.id](http://press.unisri.ac.id)  
[unisripress@gmail.com](mailto:unisripress@gmail.com)  
Anggota APPTI

ISBN 978-623-5859-02-6



9 786235 859026